



MASYARAKAT ANTI KORUPSI (MARS) SULSEL

SERUAN MASYARAKAT CINTA KPK

SAVE KPK, LANJUTKAN AGENDA PEMBERANTASAN KORUPSI

Indonesia Darurat Korupsi. Penetapan Tersangka dan penangkapan terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto oleh Bareskrim Mabes Polri disusul penetapan tersangka terhadap Abraham Samad merupakan upaya nyata mengkerdilkan, menghentikan dan membungkam pemberantasan korupsi yang saat ini sedang dilakukan KPK.

Akibat Penetapan tersangka tersebut tentunya berdampak langsung pada tumpunya kewenangan yang dimiliki KPK. Setelah membiarkan proses ini tanpa kejelasan dalam waktu cukup lama, Presiden Jokowi akhirnya bersikap: mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres). Melalui Kepres itu, Bambang Widjayanto dan Abraham Samad diberhentikan. Melalui Kepres itu pula Presiden menunjuk tiga Pejabat pelaksana tugas (Plt) menggantikan Pimpinan KPK yang lama.

Namun demikian, Presiden Jokowi belum benar-benar terlihat sedang dan akan menyelamatkan KPK dari upaya kriminalisasi. Sebab 21 orang penyidik KPK sedang dalam ancaman ditersangkakan oleh Polri. Itu artinya kriminalisasi KPK belum benar-benar redah. KPK belum aman dari serangan dan berbagai upaya kriminalisasi.

Selain itu, penting untuk dipastikan bahwa para Plt ini dalam kepemimpinannya akan benar-benar melanjutkan pengusutan (membongkar) sejumlah kasus korupsi besar yang prosesnya telah dimulai oleh Pimpinan KPK sebelumnya. Karena kasus-kasus besar tersebut adalah momok yang tak pernah selesai di negeri ini.

Olehnya itu Masyarakat Anti Korupsi (MARS) Sulsel, menyerukan kepada seluruh masyarakat yang CINTA KPK untuk:

PERTAMA, MENDESAK PRESIDEN JOKO WIDODO UNTUK MENGHENTIKAN KRIMINALISASI TERHADAP KPK; MEMASTIKAN 21 PENYIDIK KPK AKAN AMAN DARI KRIMINALISASI POLRI; SERTA MEMASTIKAN BAHWA KE DEPAN KPK AKAN AMAN DARI SERANGAN DAN SEGALA UPAYA KRIMINALISASI LAINNYA.

KEDUA, MENDESAK PLT PIMPINAN KPK UNTUK TETAP MELANJUTKAN PENYELESAIAN KASUS KORUPSI BUDI GUNAWAN, BLBI, BANK CENTURY DAN LAIN-LAIN.



MASYARAKAT ANTI KORUPSI (MARS) SULSEL

LBH Makassar, ACC-Sulawesi, KontraS Sulawesi, Walhi Sul-Sel, KOPEL Indonesia, AJI Makassar, Peradi, Ikadin, KAI, AMAN Sul-Sel, LBH-P2i, Alumni YLBHI Makassar, FIK Ornop Sulsel, SPHP Sulsel, FOSIS-UPPM UMI, HMI Mks Timur, Akademisi Sulsel, Masyarakat Pemerhati KPK, LBH Pers, SIPS Project, PBHI, ICJ, Aspek5, Perkasi, APSI, SesMak, Perak, IPPM, YLBHM, YLKI, SRIKANDI, SJPM, SP ANGING MAMMIRI, FMPPR, STP TAKALAR, Kapak SC, MMN, BEMM Makassar, MALCOM, AGRA SULSEL, KPA SULSEL, LAPAR SULSEL, JURNAL CELEBES, RUMAH SENI KASUMBA, LSKP, Pembebasan PIAR NTT, FORMAKS, FORUM DISKUSI PASCA SARJANA UNHAS, KPRM, ESENSI, KOALISI PEREMPUAN INDONESIA SULSEL, AMPERA, ORBONTA, HIPMA MATRA, Universitas Bosowa, Forum Diskusi Pasca Unhas, FIK KSM TAKALAR, BULKUMBA FORUM, UPKSBS UMI, HAMI, KONSORSIUM ADVOKAT MUDA MAKASSAR (KAMM), Yayasan JATI, YTMI, Koalisi Pers, YAPPTA-U, BEMM, IPMIL RAYA, SEMA FE-UH, ELSIC, LML, Yayasan Masagena, AAI Makassar, GMI, LPM Kertas Unifa, KPMS, DPW APSI SulSel, FPMP SulSel, KJM, HIPMA MATRA, IM3 Makassar, LPMH UH, YASMIB, Wajo Institute, SAMURAI, SMI, PEMBEBASAN, FMD, KPO-PRP.

**"LANJUTKAN PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK INDONESIA BERSIH
ATAU INDONESIA HANCUR BERSAMA KORUPTOR"**

POSKO : KANTOR LBH MAKASSAR, JL. PELITA VI, BLOK A 34 NO. 9 MAKASSAR